KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR masih utang 133 RUU
Tanggal : Senin, 12 Mei 2014
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

LEGISLASI

DPR Masih Utang 133 RUU

DENPASAR (Suara Karya): Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengakui, menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR 2014 ini, Kesekjenan DPR makin disibukkan dengan persiapan pilpres 2014.

"Setelah pelaksanaan pilpres, maka DPR disibukkan dengan persiapan pidato kenegaraan tentang nota keuangan dan RAPBN 2015," katanya saat silaturahmi dengan kordinatoriat wartawan parlemen di Bali, akhir pekan lalu.

Hadir dalam antara lain Wakil Ketua DPR Shohibul Iman, Khusnul Mar'iyah, Reni Suwarso dari Center for Election of Political Party (CEPP-UI), Piers Andreas Noak dari Universitas Udayana Bali, dan jajaran sekretariat jenderal dan pemberitaan DPR.

Menurut Winantuningtyastiti, kesekjenan DPR memiliki agenda yang padat, mulai dari 12 Mei-10 Juli 2014. Padahal, masih ada 133 RUU yang harus dibahas, dan 91 RUU diantaranya tentang pemekaran daerah dan 43 RUU lainnya.

"RUU Pemekaran daerah itu merupakan usulan DPRD dan kalau ditolak, mereka mengancam akan memisahkan diri dari NKRI dan sebagainya," katanya.

Dibagian lain, Shohibul Iman menegaskan kerjasama Setjen DPR RI dengan wartawan yang tergabung dalam koordinatoriat DPR RI, jangan sampai menghilangkan kontrol dan independensi pers dalam melaksanakan tugasnya. Tapi,juga tak boleh mengambil jarak, tanpa harus mengurangi keakraban atau silaturrahim.

"Berbeda pendapat dan sikap dalam politik itu biasa sampai pada hal-hal ideologis, dan itu dicontohkan oleh pendiri bangsa ini, namun setelah itu mereka akrab luar biasa, dan tetap memiliki komitmen bersama dalam membangun bangsa ini," katanya.

Shohibul Iman mengakui jika dalam perkembangan terakhir kinerja DPR kurang menggembirakan, dan malah diwarnai dengan maraknya korupsi yang melibatkan anggota DPR. Namun, hal itu tidak menggambarkan bahwa semua anggota DPR itu buruk.

"Masih banyak anggota yang kinerjanya bagus, dan bersih, dan itulah yang harus didukung," ujar politisi PKS.

Sejauh itu, dia juga pesimis dengan anggota DPR periode 2014-2019 yang terpilih dalam pemilu 9 April 2014 lalu, karena pemilu kali ini sebagai pemilu yang terburuk, brutal, carut-marut, banyak kecurangan, manipulasi suara, dan *money politics*, yang melibatkan penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat.

"Dengan kondisi seperti itu, dan kualitas mereka pasa-pasan, maka mendorong Setjen DPR harus bekerja lebih keras dan lebih berat lagi. Untuk itu, harus didukung oleh pers," katanya.

Pembenahan Pemilu

Sementara itu, Presiden Direktur Center for Election of Political Party (CEPP-UI) Khusnul Mar'iyah mengatakan, bahwa pelaksanaan pemilu sekarang ini, ke depan harus lebih baik, transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, pemilu itu merupakan prasyarat demokrasi, sehingga tanpa pemilu, maka tidak ada demokrasi.

"Memang sekarang ini diakui semua pihak jika pemilu amburadul, dan makin maraknya politik uang, yang melibatkan penyelenggara, peserta, dan masyarakat sendiri. Semua harus dibenahi dan ditangani lebih profesional. Khususnya dalam melibatkan hak-hak warga negara untuk memilih pemimpinnya," katanya.

Pengajar FISIP UI ini menilai, bahwa dalam pemilu itu harus ada kompetisi yang sehat, adil, jujur, dan demokratis, ada kebebesan sipil society, kebebasan pers, kebebasan membentuk organisasi, dan didukung oleh data kependudukan yang akuntabel atau data base kependudukan dan pemilih berkelanjutan.

Andreas juga menyatakan kecewa dengan pemilu dan DPR saat ini, karena kinerjanya yang buruk di mata rakyat, dan pemilu yang amburadul. Karena itu, masyarakat Bali tidak tertarik dengan berita-berita politik, karena mereka hanya 5 tahun sekali datangi rakyat. **(Rully/Sugandi)**